



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



KOMISI INFORMASI PUSAT  
Republik Indonesia

# BUKU SAKU

## IKIP 2022

### SURVEY

## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2022

**iKIP**  
INDEKS KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK

*Hak Anda untuk Tahu!*

#BukaInformasiPublik

**URGENSI KOMITMEN BERSAMA  
DALAM MENDORONG  
PENGARUSUTAMAAN KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK DI DAERAH  
BERDASARKAN IKIP 2022**

---

JOGJAKARTA, 8 SEPTEMBER 2022

# BUKU SAKU IKIP 2022

*Tim Penyusun:*

Rospita Vici Paulyn  
Gede Narayana  
Arya Sandhiyudha

*Editor :*

Annie Londa  
Melda Simamora

*Bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik,  
Hukum, dan Kemananan:*

Deputi VII Bidkor KominfoturKemenko Polhukam,  
Marsda TNI Arif Mustofa  
Asisten Deputi VII Novan Saleh  
Staf .....  
.....  
.....

## ***Kata Pengantar***

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Buku Saku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 ini dapat tersusun dengan baik.

Buku Saku IKIP 2022 ini disusun sebagai panduan praktis dalam memberikan gambaran mengenai pelaksanaan indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia berikut tingkat pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh Kelompok Kerja Daerah dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi, para Informan Ahli Daerah, para Informan Ahli Nasional, para Tim Ahli, para Tim Penulis, dan *stakeholder* lainnya yang telah bekerja keras dan terlibat aktif dalam proses pelaksanaan Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional Tahun 2022.

Semoga Buku Saku ini dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat mengenai hasil analisis terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Pada tahap selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik diseluruh Indonesia.

Jogjakarta, September 2022

Rospita Vici Paulyn  
*Komisioner Komisi Informasi Pusat RI*

# Latar Belakang



1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus hadir dengan semangat transparan, akuntabel dalam tata Kelola penyelenggaraan negara, serta disisi lain meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

2

Sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi publik melalui Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang merupakan Program Prioritas Nasional dan salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN).

3

Untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi se-Indonesia.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

# Maksud dan Tujuan

---

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan nasional. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KIP. IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di 34 provinsi.

IKIP dapat menggambarkan disparitas keterbukaan informasi publik antar daerah di Indonesia, juga kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Selain itu, ada beberapa tujuan lain yang pada gilirannya akan membawa manfaat besar baik bagi, masyarakat maupun negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.

Tujuan dilakukannya IKIP untuk:

1. Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia;
2. Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan;
3. Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota;
4. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional; dan
5. Memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah RI untuk disampaikan dalam forum internasional.

# Perbedaan IKIP dan Monev

Maksud dan tujuan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan-Badan Publik. Upaya ini diharapkan bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari Monev adalah:

1. Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir;
2. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
4. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

Ruang Lingkup Monev adalah badan publik seperti Kementerian dan Lembaga, BUMN, Perguruan tinggi negeri, Pemerintah Provinsi, juga Partai Politik. Hasil monev berupa ranking dan kategori yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Hal itu tidak menggambarkan sisi-sisi lain keterbukaan informasi.

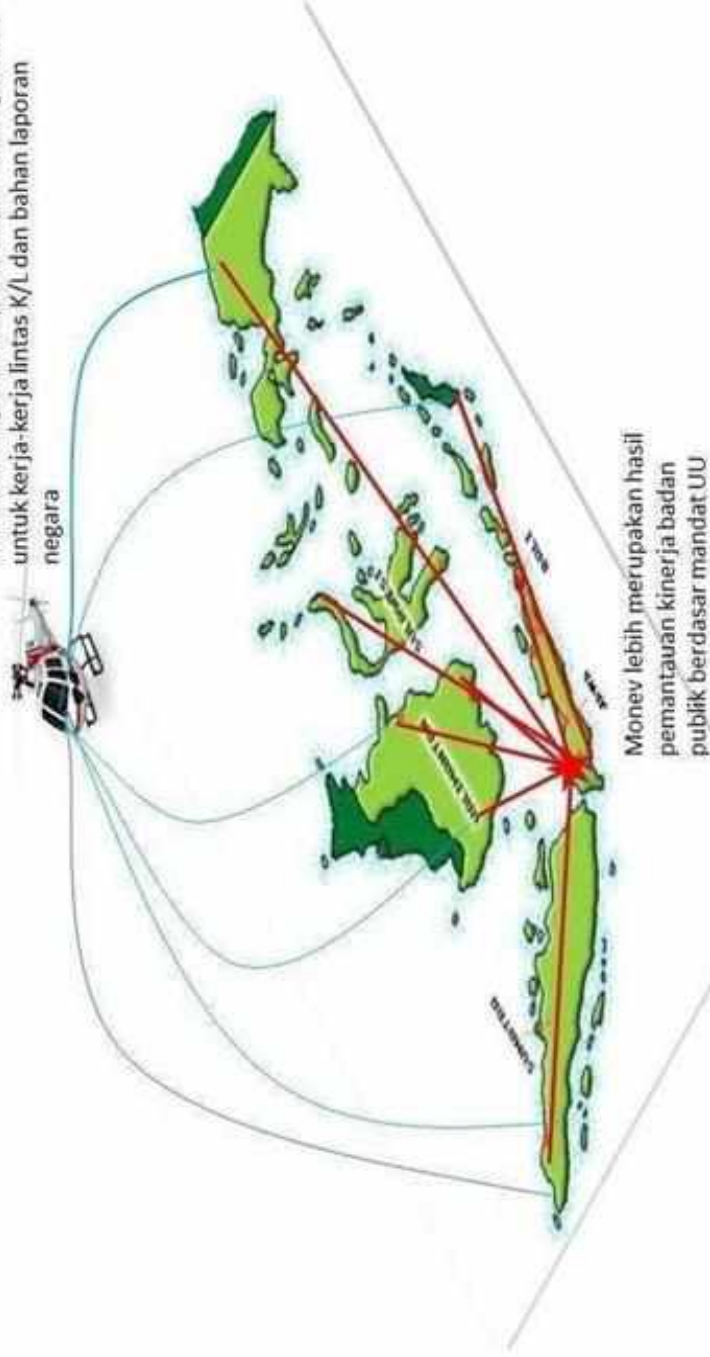
IKIP lebih dari itu, dimana IKIP menggambarkan hasil pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dari sudut pandang yang lebih luas dari 3 Lingkungan yaitu Lingkungan Fisik/Politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum. Dari 3 lingkungan dibagi kedalam 20 Indikator dan dikembangkan lagi menjadi 85 Sub-Indikator yang diterjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuisisioners survei IKIP 2022.

Adapun indeks ini menganalisa 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak msyarakat atas informasi (*access to information*).

Secara sederhana Perbedaan IKIP dan Monev nampak dalam gambar berikut:

## Perbedaan IKIP dengan Monev KIP

IKIP adalah helicopter view atas pelaksanaan kewajiban (R, P, F) dan capaian negara, serta melihat kemajuan masyarakatnya. Hasil digunakan untuk kerja-kerja lintas K/L dan bahan laporan negara



Gambar 1. Perbedaan IKIP dengan Monev KIP





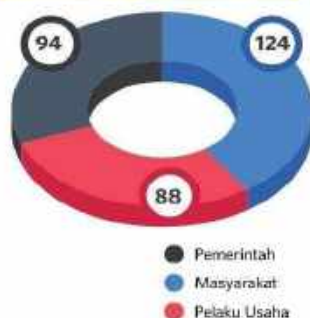
## DATA INFORMAN AHLI DAN TIM PENYELIA NASIONAL



### Informan ahli berdasar usia



### Informan Ahli berdasar unsur



### Informan Ahli berdasar gender



### Informan ahli berdasar Pendidikan



Gambar:  
*Daftar Informan Ahli dan Tim Penyelia Nasional*

## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INDONESIA 2022

---

NO	INDEKS	NILAI SKOR	BOBOT	SKOR INDEKS	SKOR IKIP
1	SKOR INDEKS NASIONAL	74,68	70%	52,28	74,43
2	SKOR NAC	73,84	30%	22,15	

## PERBANDINGAN IKIP 2021 & 2022

---

IKIP TAHUN	IKIP SKOR
2021	71.37
2022	74.43

## SKOR DIMENSI IKIP 2022

DIMENSI	NAMA DIMENSI	SKOR NASIONAL PROVINSI	BOBOT	SKOR DIMENSI NASIONAL PROVINSI	SKOR NAC	BOBOT	SKOR DIMENSI NAC	SKOR DIMENSI IKIP
1	Dimensi Fisik dan Politik	75,20	70%	52,64	72,98	30%	21,89	74,53
2	Dimensi Ekonomi	75,46	70%	52,82	73,38	30%	22,01	74,84
3	Dimensi Hukum	73,28	70%	51,30	75,60	30%	22,68	73,98

## PERBANDINGAN DIMENSI IKIP 2021 DAN 2022

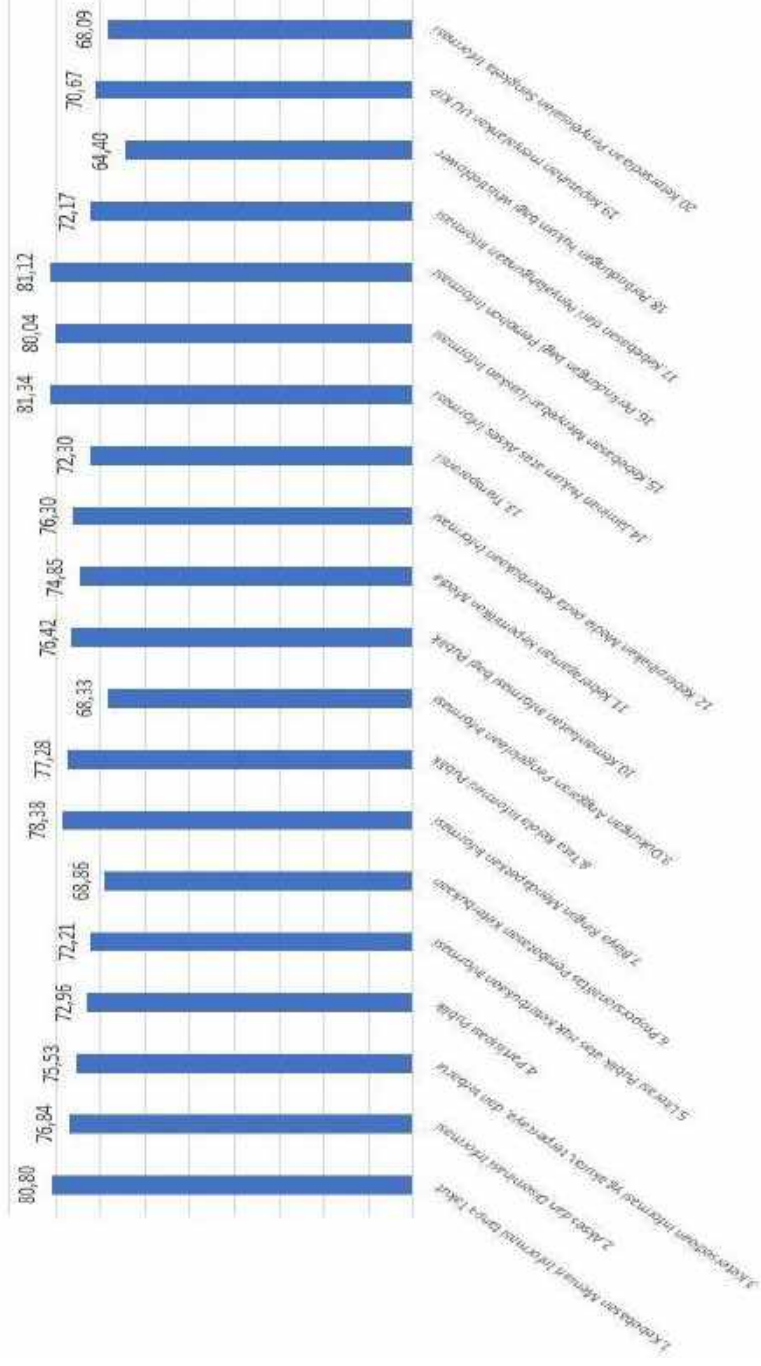
DIMENSI	INDEKS 2021	INDEKS 2022	PERUBAHAN
FISIK POLITIK	70.41	74,53	4.12
EKONOMI	68.89	74,84	5.95
HUKUM	74.62	73,98	-0.64

## SKOR INDIKATOR IKIP 2022

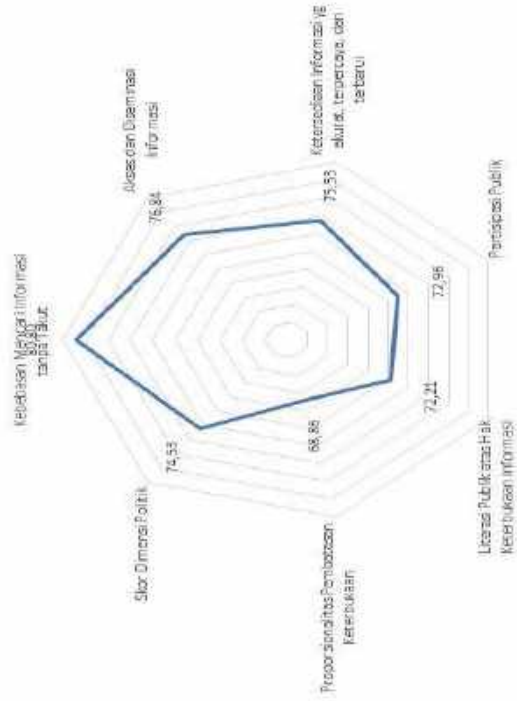
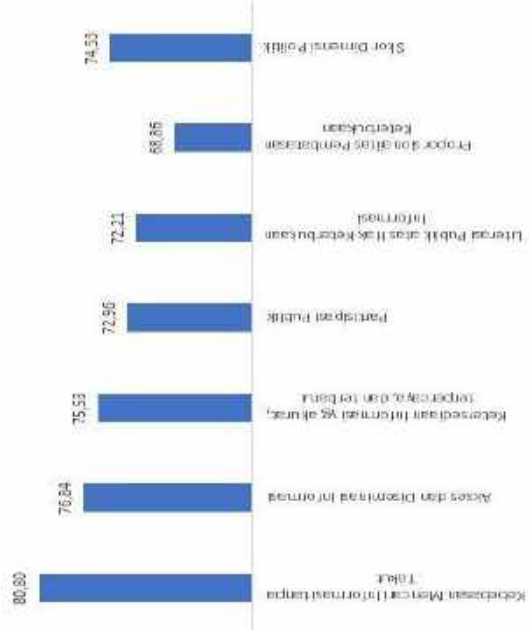
NO.	NAMA INDIKATOR	NILAI INDIKATOR NASIONAL PROVINSI	BOBOT	SKOR INDIKATOR NASIONAL PROVINSI	NILAI INDIKATOR NAC	BOBOT	SKOR INDIKATOR NAC	SKOR INDIKATOR IKIP
1	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut (7)	81,83	70%	57,28	78,41	30%	23,52	80,80
2	Akses dan Diseminasi Informasi (10)	77,48	70%	54,24	75,35	30%	22,61	76,84
3	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru (8)	76,94	70%	53,86	72,24	30%	21,67	75,53
4	Partisipasi Publik (4)	74,08	70%	51,86	70,35	30%	21,11	72,96
5	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi (4)	72,58	70%	50,80	71,35	30%	21,41	72,21
6	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan (2)	68,28	70%	47,80	70,19	30%	21,06	68,86
7	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi (3)	78,71	70%	55,09	77,63	30%	23,29	78,38
8	Tata Kelola Informasi Publik (2)	78,05	70%	54,64	75,47	30%	22,64	77,28
9	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (2)	68,63	70%	48,04	67,65	30%	20,29	68,33
10	Kemanfaatan Informasi bagi Publik (5)	77,19	70%	54,03	74,63	30%	22,39	76,42

NO	NAMA INDIKATOR	NILAI INDIKATOR NASIONAL PROVINSI	BOBOT	SKOR INDIKATOR NASIONAL PROVINSI	NILAI INDIKATOR NAC	BOBOT	SKOR INDIKATOR NAC	SKOR INDIKATOR IKIP
11	Keberagaman Kepemilikan Media (3)	75,46	70%	52,82	73,44	30%	22,03	<b>74,85</b>
12	Keberpakaian Media pada Keterbukaan Informasi (4)	78,11	70%	54,68	72,06	30%	21,62	<b>76,30</b>
13	Transparansi (3)	72,11	70%	50,48	72,76	30%	21,83	<b>72,30</b>
14	Jaminan Hukum atas Akses Informasi (1)	82,00	70%	57,40	79,81	30%	23,94	<b>81,34</b>
15	Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi (1)	81,19	70%	56,83	77,38	30%	23,21	<b>80,04</b>
16	Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1)	82,23	70%	57,56	78,53	30%	23,56	<b>81,12</b>
17	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (3)	71,72	70%	50,20	73,24	30%	21,97	<b>72,17</b>
18	Perlindungan hukum bagi whistleblower (3)	60,14	70%	42,10	74,33	30%	22,30	<b>64,40</b>
19	Kepatuhan menjalankan UU KIP (5)	71,15	70%	49,81	69,53	30%	20,86	<b>70,67</b>
20	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi (14)	64,54	70%	45,18	76,35	30%	22,91	<b>68,09</b>

# SKOR 20 INDIKATOR IKIP 2022



# Indikator Dimensi Politik

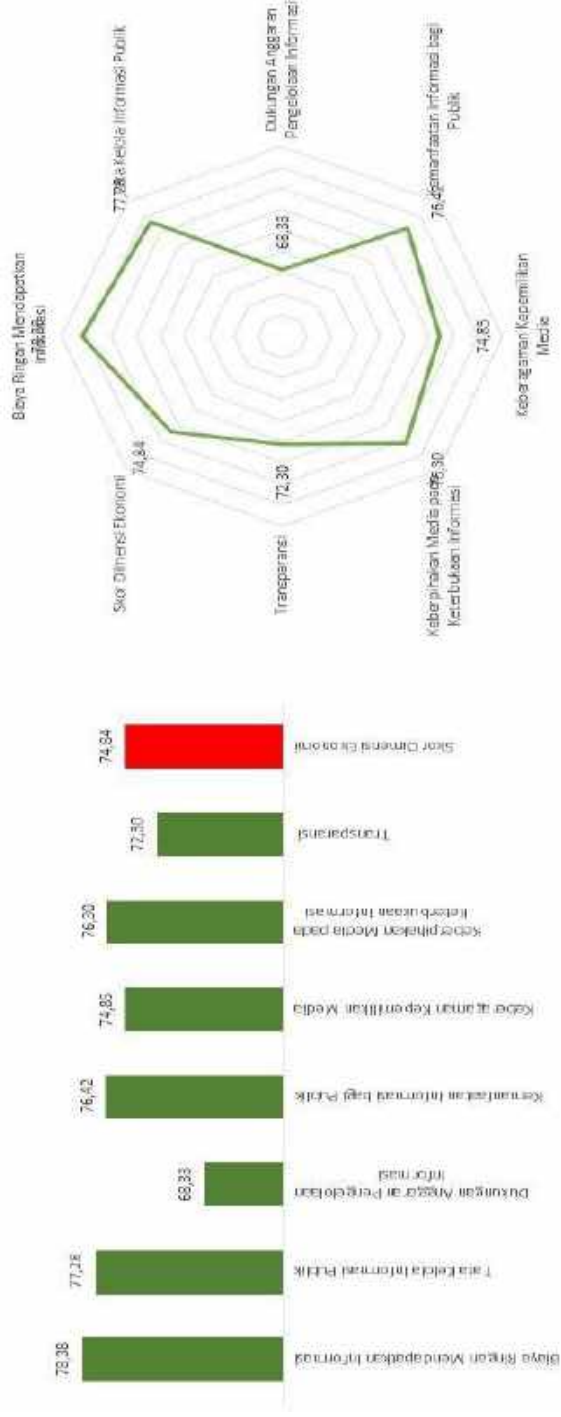


## Skor Dimensi Fisik & Politik Provinsi Tahun 2022





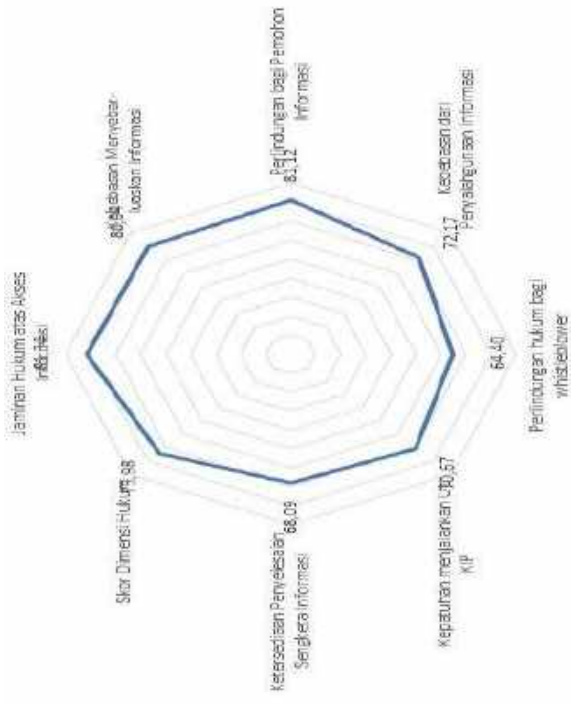
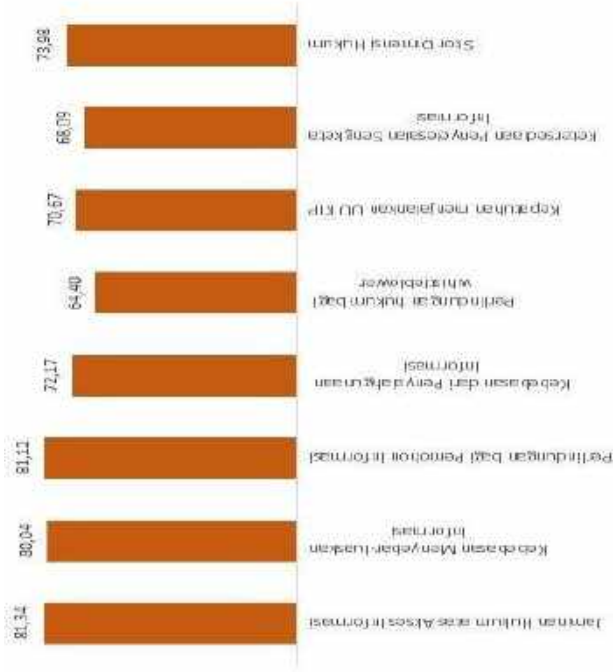
# Indikator Dimensi Ekonomi



# Skor Dimensi Ekonomi Provinsi Tahun 2022



# Indikator Dimensi Hukum



## Skor Dimensi Hukum Provinsi Tahun 2022





# SKOR IKIP 2022



Capaian IKIP  
34 Provinsi



**Baik 3 Provinsi**  
*[Jawa Barat, Bali, NTB]*

**Sedang 30 Provinsi**  
*[Jambi, Sumut, Babel, Bengkulu, Suisel, Banten, Kepri, Jateng, Lampung, Sumsel, Sulteng, Kaltim, Aceh, Jatim, NTT, Sulbar, Kalsel, Riau, Sultra, Sumbang, Kalbar, Kalteng, DKI Jakarta, Kaltara, Maluku, DIY, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Sulut]*

**Buruk 1 Provinsi**  
*[Maluku Utara]*

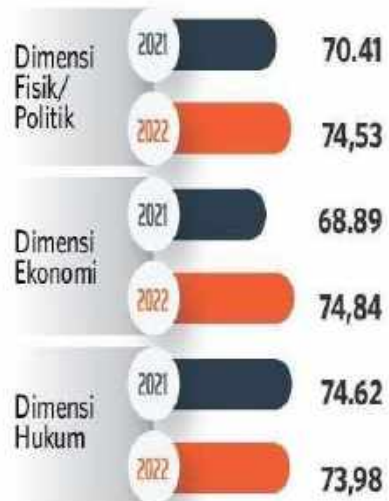
# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK INDONESIA 2022



Skor & Hasil IKIP 2022



## Indeks Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Lingkungan

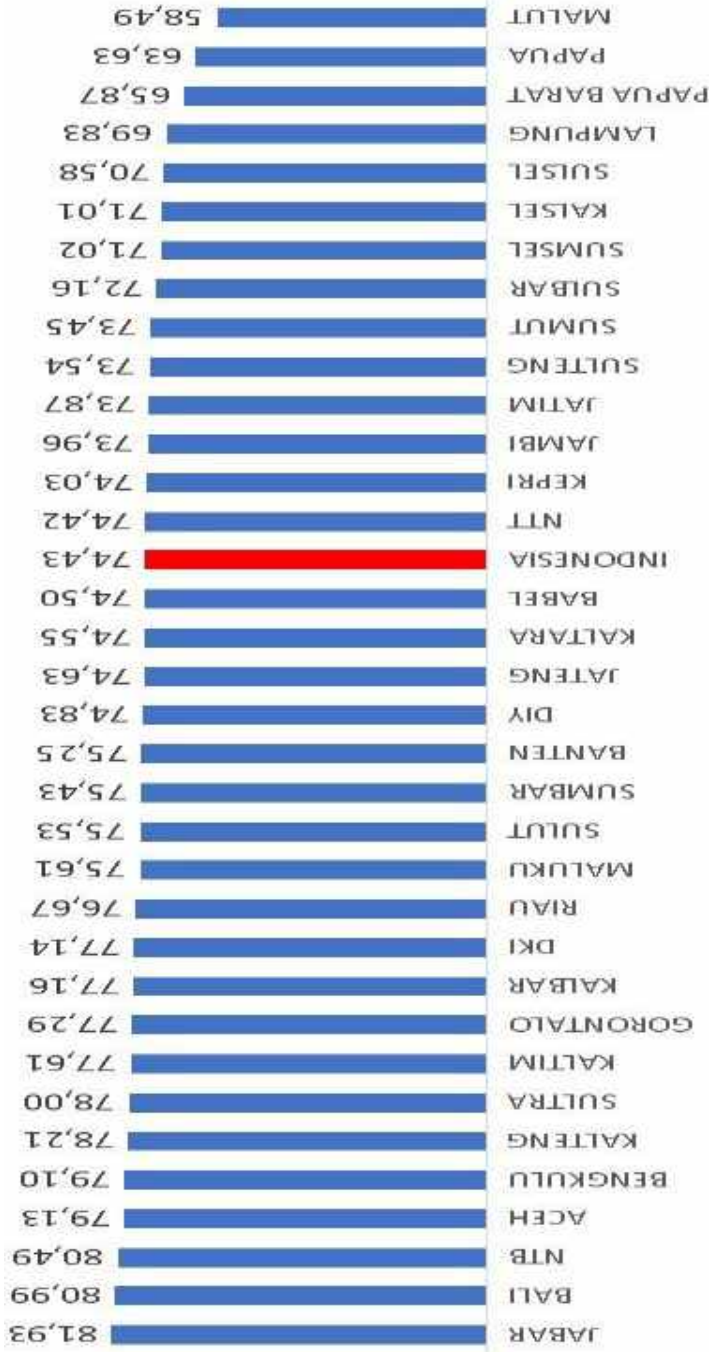


*Perbandingan Skor IKIP 2021 & 2022*

## PERBANDINGAN SKOR INDIKATOR IKIP 2021 DAN 2022

INDIKATOR	2021	2022	Perubahan
1. Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	75.85	80.80	4.96
2. Akses dan Diseminasi Informasi	71.99	76.84	4.86
3. Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	70.03	75.53	5.50
4. Partisipasi Publik	67.29	72.96	5.67
5. Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	65.95	72.21	6.26
6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	71.34	68.86	-2.49
7. Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	72.29	78.38	6.09
8. Tata Kelola Informasi Publik	71.67	77.28	5.60
9. Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	61.70	68.33	6.63
10. Kemanfaatan Informasi bagi Publik	68.85	76.42	7.57
11. Keberagaman Kepemilikan Media	70.56	74.85	4.29
12. Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	72.06	76.30	4.23
13. Transparansi	65.10	72.30	7.20
14. Jaminan Hukum atas Akses Informasi	79.15	81.34	2.19
15. Kebebasan Menyebarkan-luaskan Informasi	76.99	80.04	3.06
16. Perlindungan bagi Pemohon Informasi	76.93	81.12	4.19
17. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	72.23	72.17	-0.05
18. Perlindungan hukum bagi whistleblower	72.38	64.40	-7.98
19. Kepatuhan menjalankan UU KIP	71.33	70.67	-0.67
20. Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	73.32	68.09	-5.24

## INDEKS IKIP 34 PROVINSI DAN NASIONAL





## PERBANDINGAN INDEKS KIP PROVINSI 2021 DAN 2022

---

PROVINSI	2021	2022	Perubahan	PROVINSI	2021	2022	Perubahan
JABAR	78.56	81.93	3.37	JATENG	73.46	74.63	1.17
BALI	83.15	80.99	-2.16	KALTARA	69.84	74.55	4.71
NTB	77.9	80.49	2.59	BABEL	76.51	74.5	-2.01
ACEH	79.51	79.13	-0.38	NTT	77.1	74.42	-2.68
BENGKULU	70.19	79.1	8.9	KEPRI	75.15	74.03	-1.12
KALTENG	65.11	78.21	13.1	JAMBI	71.87	73.96	2.09
SULTRA	78.04	78	-0.04	JATIM	66.82	73.87	7.05
KALTIM	76.96	77.61	0.65	SULTENG	55.72	73.54	17.83
GORONTALO	65.22	77.29	12.07	SUMUT	69.02	73.45	4.42
KALBAR	80.38	77.16	-3.21	SULBAR	71.39	72.16	0.76
DKI	70.23	77.14	6.9	SUMSEL	71.54	71.02	-0.52
RIAU	73.45	76.67	3.22	KALSEL	68.32	71.01	2.69
MALUKU	68.95	75.61	6.66	SULSEL	68.43	70.58	2.14
SULUT	67.31	75.53	8.22	LAMPUNG	69.81	69.83	0.02
SUMBAR	70.6	75.43	4.84	PAPUA BARAT	47.48	65.87	18.39
BANTEN	77.63	75.25	-2.38	PAPUA	66.94	63.63	-3.32
DIY	76.59	74.83	-1.76	MALUT	63.19	58.49	-4.69

## TREN DAN DINAMIKA IKIP PROVINSI TAHUN 2021 DAN 2022

NO.	PROVINSI	IKIP 2022		IKIP 2021		PERUBAHAN	
		SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT	SKOR	PERINGKAT
1	JAWA BARAT	81,93	1	78,56	4	3,37	▲ 3
2	BAJU	80,99	2	83,15	1	-2,16	▼ -1
3	NUSA TENGGARA BARAT	80,49	3	77,90	6	2,59	▲ 3
4	ACEH	79,13	4	79,51	3	-0,38	▼ -1
5	BENGKULU	79,10	5	70,19	20	8,91	▲ 15
6	KALIMANTAN TENGAH	78,21	6	65,11	31	13,10	▲ 25
7	SULAWESI TENGGARA	78,00	7	78,04	5	-0,04	▼ -2
8	KALIMANTAN TIMUR	77,61	8	76,96	9	0,65	▲ 1
9	GORONTALO	77,29	9	65,22	30	12,07	▲ 21
10	KALIMANTAN BARAT	77,16	10	80,38	2	-3,22	▼ -8
11	DKI JAKARTA	77,14	11	70,23	19	6,91	▲ 8
12	RIAU	76,67	12	73,45	14	3,22	▲ 2
13	MALUKU	75,61	13	68,95	24	6,66	▲ 11
14	SULAWESI UTARA	75,53	14	67,31	27	8,22	▲ 13
15	SUMATERA BARAT	75,43	15	70,60	18	4,83	▲ 3
16	BANTEN	75,25	16	77,63	7	-2,38	▼ -9
17	DI YOGYAKARTA	74,83	17	76,59	10	-1,76	▼ -7
18	JAWA TENGAH	74,63	18	73,46	13	1,17	▼ -5
19	KALIMANTAN UTARA	74,55	19	69,84	21	4,71	▼ 2
20	BANGKA BELITUNG	74,50	20	76,51	11	-2,01	▼ -9
21	NUSA TENGGARA TIMUR	74,42	21	77,10	8	-2,68	▼ -13
22	KEPULAUAN RIAU	74,03	22	75,15	12	-1,12	▼ -10
23	JAMBI	73,96	23	71,87	15	2,09	▼ -8
24	JAWA TIMUR	73,87	24	66,82	29	7,05	▲ 5
25	SULAWESI TENGAH	73,54	25	55,72	33	17,82	▲ 8
26	SUMATERA UTARA	73,45	26	69,02	23	4,43	▼ -3
27	SULAWESI BARAT	72,16	27	71,39	17	0,77	▼ -10
28	SUMATERA SELATAN	71,02	28	71,54	16	-0,52	▼ -12
29	KALIMANTAN SELATAN	71,01	29	68,32	26	2,69	▼ -3
30	SULAWESI SELATAN	70,58	30	68,43	25	2,15	▼ -5
31	LAMPUNG	69,83	31	69,81	22	0,02	▼ -9
32	PAPUA BARAT	65,87	32	47,48	34	18,39	▲ 2
33	PAPUA	63,63	33	66,94	28	-3,31	▼ -5
34	MALUKU UTARA	58,49	34	63,19	32	-4,70	▼ -2

## Capaian Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi (Monev)

Komisi Informasi Pusat 2018 - 2021



Capaian Pelaksanaan Monev KIP 2018-2021



# SKOR IKIP 2022 BERDASAR INDIKATOR

	Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	75,85	80,80
Akses dan Diseminasi Informasi	71,99	76,84
Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	70,03	75,53
Partisipasi Publik	67,29	72,96
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	65,95	72,21
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	71,34	68,86
<b>Skor Dimensi Politik</b>	<b>70,41</b>	<b>74,53</b>

## INDIKATOR Dimensi Fisik/Politik



## INDIKATOR Dimensi Ekonomi

	Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	72,29	78,38
Tata Kelola Informasi Publik	71,67	77,28
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	61,70	68,33
Kemanfaatan Informasi bagi Publik	68,85	76,42
Keberagaman Kepemilikan Media	70,56	74,85
Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	72,06	76,30
Transparansi	65,10	72,30
<b>Skor Dimensi Ekonomi</b>	<b>68,89</b>	<b>74,84</b>

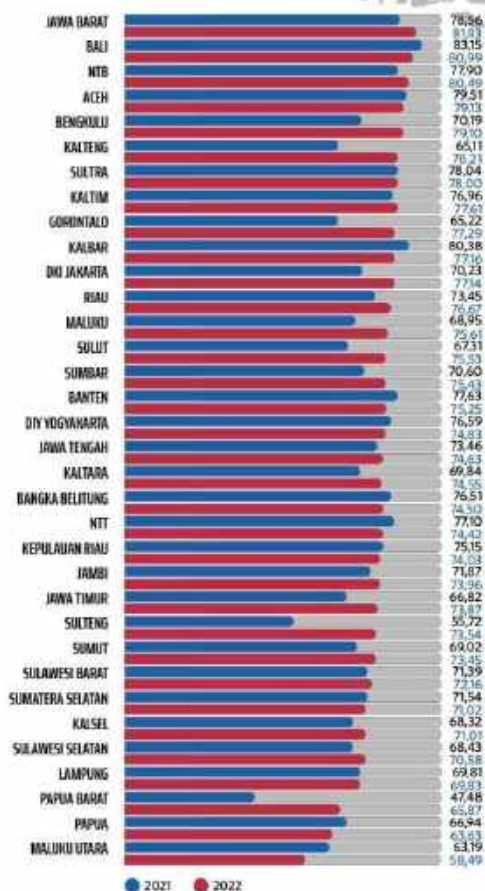
## INDIKATOR Dimensi Hukum

	Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Jaminan Hukum atas Akses Informasi	79,15	81,34
Kebebasan Menyebarkan Informasi	76,99	80,04
Perlindungan bagi Pemohon Informasi	76,93	81,12
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	72,23	72,17
Perlindungan hukum bagi whistleblower	72,38	64,40
Kepatuhan menjalankan UU KIP	71,33	70,67
Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	73,32	68,09
<b>Skor Dimensi Hukum</b>	<b>74,62</b>	<b>73,98</b>





# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PER PROVINSI 2022



## Dimensi Fisik/Politik

- **5 Tertinggi** : Jawa Barat, Bali, NTB, Bengkulu, Aceh
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Kalimantan Selatan



## Dimensi Ekonomi

- **5 Tertinggi** : Jawa Barat, Bali, NTB, Aceh, Sulawesi Tenggara
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Sulsel



## Dimensi Hukum

- **5 Tertinggi** : NTB, Jawa Barat, Bali, Aceh, Bengkulu
- **5 Terendah** : Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Selatan

# Urgensi Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

01

Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang anti korupsi.

02

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. serta mengawal informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan di ruang-ruang publik.

03

Memastikan pejabat-pejabat publik di masing-masing daerah untuk melaksanakan secara konkrit Keterbukaan Informasi Publik

04

Menciptakan masyarakat informatif.



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



KOMISI INFORMASI PUSAT  
Republik Indonesia



# iKIP

INDEKS KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK

2022

*Hak Anda untuk Tahu!*

#BukaInformasiPublik